

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Pencegahan dan pemberantasan penyakit menjadi prioritas pembangunan kesehatan masyarakat di Indonesia. Pasalnya, ini menjadi salah satu hal yang harus dipenuhi dalam membangun sektor kesehatan. Selain itu, permasalahan ini juga harus kunjung diselesaikan, mengingat adanya potensi munculnya kembali penyakit-penyakit menular yang dimana meskipun pada masa lalu relatif sudah dapat dikendalikan. Sebagai langkah penanggulangan akan terjadinya penyakit menular tersebut, memang tidak hanya terbatas pada upaya pengobatan saja. Namun, patut dilakukan tindakan preventif terhadap kematian serta kecacatan. Sebab, kecacatan dapat berpotensi menimbulkan penyusutan terhadap produktivitas manusia, dimana hal ini dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat di sebuah negara (Astuti, 2016).

Secara biologis, penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh agen infeksi, baik itu virus, jamur, bakteri atau beberapa parasit yang disebabkan oleh penularan ataupun dari patogen ke pejamu yang rentan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara seperti media seperti air, udara, tanaman, dan lain sebagainya (Last, 1993).

Di Indonesia, penyakit menular masih menjadi perbincangan tersendiri. Berdasarkan data yang diperoleh dalam buku (Najmah, SKM, 2015, p. 14), Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah tinggi

kasus penyakit menular. Dari banyaknya penyakit menular yang ada di Indonesia, poliomielitis menjadi salah satu penyakit yang harus diwaspadai dan cukup mengkhawatirkan. Poliomielitis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus polio. Penyakit ini menyerang sistem saraf dan menyebabkan kelumpuhan yang permanen dengan hanya hitungan jam saja. Dari pernyataan tersebut tentu dapat dipahami apabila poliomielitis merupakan penyakit yang dapat menyebabkan mortalitas dan morbiditas. Selain itu, yang perlu diperhatikan lebih lanjut ialah, walaupun penyakit ini dapat menyerang semua kelompok umur, namun yang paling rentan terjangkit oleh penyakit menular ini ialah dari kalangan umur yang kurang dari tiga tahun (dimana 50-70% dari semua kasus poliomielitis) (Kandun, 2005).

Sebagai catatan, poliomielitis menjadi salah satu masalah kesehatan di seluruh dunia. Bagaimana tidak, virus ini tidak dapat dihilangkan secara manual atau sebegitu mudahnya. Virus polio tidak musnah dengan pembersih seperti detergen, sabun, alkohol, eter atau bahkan khloroform. Virus polio akan mati apabila dibakar, dimusnahkan dengan sinar ultra violet, ataupun menggunakan cairan pemutih pakaian. Virus ini juga dapat menjangkiti anak-anak yang memiliki umur lebih besar ataupun orang dewasa yang umumnya mempunyai kekebalan terhadap virus. Dimana mereka tidak sakit, tetapi membantu menyebarkan virus liar kepada anak yang belum kebal terhadap virus ini. ¹

¹ WHO. Pekan Imunisasi Nasional Polio, ed. F. Polio. 2006: WHO, CDC, Unicef.

Di sebagian besar negara endemis, 70–80% pengidap polio berusia dibawah tiga tahun dan 80–90% diantaranya berusia dibawah lima tahun. Dalam kasus poliomielitis, yang memiliki risiko tinggi untuk tertular ialah kelompok yang rentan seperti kelompok-kelompok yang menolak untuk imunisasi, kelompok minoritas, para migrasi musiman, pengungsi, kelompok nomaden, dan bahkan masyarakat miskin yang berada di pinggir perkotaan (James Chin, 1995). Pada pernyataan James Chin diatas, dapat dipahami bahwa polio secara serius telah menjadi ancaman bagi seluruh negara, tidak hanya negara maju, namun juga menjadi masalah serius bagi negara berkembang.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang berusaha untuk menciptakan kemakmuran serta kesejahteraan rakyatnya tentu saja berusaha melakukan segala upaya melalui pembangunan di segala bidang, termasuk dalam bidang kesehatan melalui program pembangunan kesehatan. Antara negara berkembang dan negara maju memang terdapat kesenjangan yang cukup besar mengenai sistem kesehatan (Kruk et al., 2018).

Disisi lain, kasus polio ditemukan di negara maju dimana penderitanya ialah orang-orang yang belum pernah diimunisasi, termasuk mereka yang mengadakan perjalanan ke negara endemis. Kasus polio di negara maju juga umumnya berkaitan dengan jenis vaksin yang digunakan, yaitu yang disebabkan oleh virus vaksin itu sendiri. Di daerah endemis, kasus polio muncul secara sporadis ataupun dalam bentuk Kejadian Luar Biasa (KLB). Jumlah penderita meningkat pada akhir musim panas dan pada saat musim

gugur di daerah beriklim dingin. Di negara-negara tropis, puncak musiman terjadi pada saat musim panas dan musim hujan (Chin, 2000, p. 53).

Terdapat 350.000 kasus poliomielitis pada tahun 1988 yang disebabkan oleh virus polio di 125 negara. Hal ini lantas membuat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara sigap mengumumkan tanggap darurat terhadap penyebaran virus polio. Penyebaran virus ini dapat meningkat seiring berjalannya waktu apabila tidak dilakukan penanganan secara cepat dan tepat. Menurut WHO, penyebaran polio sangat penting dan jelas membutuhkan respon internasional. Masyarakatpun memiliki kekhawatiran akan penyebaran virus ini di berbagai negara di belahan dunia yang akan terus meningkat dengan waktu yang cepat.

Menurut (Najmah, SKM, 2015), selama masih ada satu anak saja yang menderita polio, maka rantai penyebaran polio akan tetap ada dan terus terjadi. Hal ini juga dijumpai di Indonesia, dimana diberitakan oleh koran Angkatan Bersenjata pada 2 September 1995 bahwa memang benar di Indonesia sendiri kasus polio dari tahun-ketahun menunjukkan sebuah penurunan jumlah pengidap. Dari tahun 1990 misalnya, tercatat sebanyak 465 orang yang dilaporkan menderita penyakit polio, selanjutnya di tahun 1991 tercatat sebanyak 221 orang penderita, lalu di tahun 1992 tercatat 108 orang, dan untuk tahun 1993 dilaporkan sebanyak 23 orang penderita.

Namun, untuk setiap anak yang terinfeksi polio, terdapat sekitar 100–1000 anak yang terinfeksi tanpa menunjukkan gejala. Ini merupakan akar masalahnya, dimana anak-anak tersebut dapat menyebarkan virus polio

ke anak-anak lain. Jadi apabila kita hitung dari 465 kasus polio yang dilaporkan di Indonesia pada tahun 1990, terdapat kemungkinan antara 46.500 hingga 465.000 orang dengan polio asimtomatik dimana berpotensi menulari orang lain yang *immunocompromised* atau bahkan non-imun. Polio dapat menyebar secara luas dan diam-diam karena kebanyakan orang yang terinfeksi virus polio tidak memiliki gejala dan tidak mengetahui bahwa mereka sedang terinfeksi (Najmah, SKM, 2015).

Menteri kesehatan yang pada saat itu menjabat, Dr. Sujudi menyampaikan bahwa penyebaran polio dari tahun ketahun memang terus menurun, namun hal ini bukan berarti Indonesia terbebas dari polio. Bahkan beliau juga dengan tegas menyatakan, apabila meskipun hanya tinggal satu kasus pun tersisa, jika memang ada, tetap perlu dilakukan eradikasi (dihapuskan). Polio sendiri termasuk dalam kategori penyakit menular yang dapat dicegah dengan dilakukannya imunisasi. Seperti melalui PIN (Pekan Imunisasi Nasional), selanjutnya dilakukan Mopping Up, hingga surveilans AFP yang di usung oleh Kementerian Kesehatan Indonesia yang dimaksudkan untuk menghapus penyebaran virus.

Virus polio sendiri sudah ada di Indonesia sejak puluhan tahun lalu mengingat di Indonesia sebelum PD II, penyakit polio merupakan penyakit yang *sporadic endemic, epidemic* pernah terjadi di berbagai daerah seperti Biliton (1948) sampai ke Banda, Balikpapan. Bandung (1951), Surabaya (1952), Semarang (1954), Medan (1957), dan terjadi di tahun 1977 di Bali

Selatan.² Bahkan Indonesia sendiri juga telah melakukan program imunisasi yang ekstensif sejak 1980, dimana membuat jumlah kasus polio di Indonesia menurun, tetapi ia tetap ada dan memiliki potensi untuk menimbulkan wabah atau kejadian luar biasa (Depkes, 2009, p. 257).

Indonesia sebagai salah satu negara yang mengalami epidemi polio merupakan negara dengan populasi anak terbesar di dunia. Menurut data BAPPENAS pada tahun 1971 hingga 1990 jumlah masyarakat pada kelompok umur 0—4 tahun, 5—9 tahun dan 10—14 tahun memiliki angka yang sangat besar jumlahnya dibandingkan jumlah penduduk kelompok umur lain. Hal ini tentu menjadi kesempatan besar bagi penyebaran virus polio dalam penglihatan epidemiologi poliomiелitis.

Sehingga hal ini tentu menjadi pembahasan yang penting karena mengingat kelangsungan hidup anak yang nantinya akan menentukan kualitas sumberdaya manusia di masa yang akan datang bagi bangsa dan negara, maka kelangsungan penyakit menular yang mengancam tidak boleh diabaikan. Oleh sebab itu diperlukan intervensi yang tepat untuk menurunkan angka dan menyapu bersih virus polio. Ketika faktor-faktor penting yang mempengaruhi kelangsungan hidup anak-anak telah diketahui, intervensi yang efektif tentu dapat dilakukan dengan baik.

Selain itu dalam menghadapi epidemi polio ini, Indonesia secara serius melakukan pemutusan terhadap virus polio dengan menunjukkan kemajuan dalam bidang kesehatan, baik meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan,

² http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/05/120524_polio.shtml Internet : di akses pada tanggal 6 Desember 2021

menurunkan angka kematian bayi dan anak, melakukan perbaikan gizi, melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit dan lain sebagainya. Program pembangunan kesehatan dari periode ke periode terus menunjukkan keseriusannya kepada masyarakat. Dimana memang seharusnya pembangunan mempunyai makna hakiki sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Syahrie, 2009, p. 2)

Hal ini dapat terwujud sebab langkah WHO yang telah meluncurkan rencana untuk melakukan pemberantasan polio yang disebut dengan Global Polio Eradication Initiative (GPEI). Tepat setelah WHO 1988 mengeluarkan resolusi untuk memberantas polio, inisiatif pemberantasan polio secara global diluncurkan dengan target selesai atau bebas polio pada tahun 2000. Sebagai anggota dari WHO, Presiden Soeharto telah setuju untuk turut melakukan eradikasi terhadap polio. Itulah sebabnya, Indonesia bertekad memutuskan rantai penularan polio secara masif. Tujuan dari GPEI itu sendiri (di Indonesia dikenal sebagai Pemberantasan Poliomieltitis atau ERAPO) ialah untuk memutus rantai penularan virus polio melalui upaya bersama dalam skala global. Inisiatif ini mendorong WHO untuk mendukung negara-negara, termasuk Indonesia yang menjadi salah satu anggota WHO untuk lebih mengembangkan kapasitas pengendalian polio dalam segala aspek yang diperlukan, mulai dari peningkatan pembangunan kesehatan hingga penyelenggaraan kampanye dalam skala nasional.

Dalam hal ini, Indonesia memperkenalkan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) sebagai salah satu kampanye kesehatan masyarakat terbesar di abad

ke-20 untuk membasmi penyakit polio. PIN bertujuan untuk mempercepat pemutusan siklus hidup virus polio dengan memvaksinasi setiap anak, termasuk bayi baru lahir dengan imunisasi polio terlepas dari riwayat imunisasi sebelumnya. Imunisasi sendiri merupakan bentuk intervensi kesehatan yang sangat efektif dan menjadi prioritas utama pelayanan kesehatan di bidang pencegahan. Dalam beberapa dekade yang lalu, kejadian penyakit menular telah menurun di negara-negara maju di mana imunisasi secara luas diberikan dengan teratur (Ranuh, et al., 2014).

PIN dilakukan pada tanggal 13 hingga 17 September 1995 dan 18 hingga 22 Oktober 1995. PIN dilaksanakan secara serentak dan dibagi menjadi tiga gelombang, yaitu pada tahun 1995 itu sendiri, lalu berlanjut di tahun 1996 dan 1997. Proses kampanye kesehatan ini memakan waktu yang cukup lama, dikarenakan masalah geografis Indonesia yang cukup beraneka ragam (Suryawidjaja, 2005).

Pemberian imunisasi polio pada program PIN ini dilaksanakan di berbagai tempat, seperti Posyandu, Polindes, Poskesdes, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Klinik Swasta dan Rumah Sakit serta pos pelayanan imunisasi lainnya di bawah koordinasi dinas kesehatan setempat. Setelah dilaksanakan PIN selama tiga tahun berturut-turut tersebut, virus polio

di Indonesia dinyatakan sudah tidak ditemukan lagi sejak 1995. Menteri Kesehatan, Dr. Sujudi dalam banyak kesempatan mengatakan tujuannya untuk membebaskan rakyat Indonesia dari incaran virus polio. Terutama di kalangan balita dan anak-anak yang akan menjadi pewaris masa

depan bangsa Indonesia kelak.

Kesuksesan PIN ini tidak luput dari kerjasama seluruh komponen masyarakat. Bahkan, menjelang hari pelaksanaan PIN, berita mengenai kampanye ini meluas dari koran terbitan lokal maupun daerah hingga bisa kita saksikan melalui iklan semua penyiaran televisi Jakarta dan Surabaya. Semua kampanye dilakukan dengan satu tujuan, yaitu, agar masyarakat tidak melewatkan kesempatannya dalam pelaksanaan PIN mendatang.

Menurut dr. I Nyoman Kandun selaku mantan Direktur Jendral Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan, kesuksesan PIN ini tidak mungkin terjadi tanpa dukungan masyarakat yang kuat serta strategi pemerintah yang jelas. Semua ikut membantu dalam proses PIN, dari Pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, kader, kelompok agama, organisasi profesi, swasta, bahkan selebritis berperan untuk mendukung PIN. Indonesia juga mendapat dukungan kuat dari organisasi internasional seperti WHO, UNICEF, Rotary International, dan negara-negara lain yang memungkinkan negara untuk mengembangkan infrastruktur yang diperlukan untuk memerangi polio.

Setelah PIN diselenggarakan selama tiga gelombang dalam tiga tahun berturut-turut, untuk mengisi kekosongan terhadap sasaran imunisasi,

dilakukanlah mopping up. Kegiatan penyisiran ini dilakukan secara *door to door* untuk imunisasi polio tambahan bagi anak-anak di daerah yang diduga

masih beredar virus polio liar atau mengalami insiden kasus polio liar.

Selain melakukan pekan imunisasi dan mopping out sebagai bentuk

preventif untuk mengeradikasi polio. Pemerintah juga menjalankan program pengawasan AFP (Acute Flaccid Paralysis) atau mendeteksi lumpuh layuh akut. Tujuannya adalah untuk menemukan anak lumpuh yang mungkin terinfeksi virus polio. Program ini bertujuan untuk mencoba menemukan dan membuktikan bahwa setiap anak lumpuh di bawah usia 15 tahun tidak disebabkan oleh virus polio dengan memeriksa tinja pasien AFP. Kondisi ini merupakan kondisi yang serius bagi mereka yang mengalami AFP karena dapat menyebabkan kematian atau kecacatan permanen jika tidak ditangani dengan baik.

Kementerian kesehatan Indonesia dalam hal ini tentu melakukan suatu gerakan yang membawa keberhasilan terhadap eradikasi polio. Tekad bebas polio bukan saja di Indonesia, tetapi merupakan tekad global, karena upaya pemusnahan penyakit tersebut dilakukan seluruh dunia melalui penggalakan imunisasi. Program dan kebijakan yang dilakukan kementerian kesehatan untuk melakukan eradikasi terhadap epidemi polio dimana ini merupakan gerakan nasional yang bersejarah dan akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu permasalahan epidemi penyakit polio di Indonesia khususnya pada masa jabatan Menteri Kesehatan Indonesia Dr. Sujudi dalam Kabinet Pembangunan VI menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Pemilihan fokus penelitian di era ini mengingat pada masa jabatannya dilaksanakan beberapa upaya secara nyata menurunkan angka penderita polio secara drastis, bahkan nol kasus.

Penulis juga menyadari bahwa permasalahan mengenai penyakit ini

sudah disebut-sebut dalam beberapa buku dan jurnal ilmiah. Seperti pada buku *Sejarah Pembangunan Kesehatan Indonesia 1973-2009* (2011) oleh Kementerian Kesehatan Indonesia yang dalam salah satu sub bab dari buku ini menjelaskan bagaimana upaya pembangunan dalam bidang kesehatan di Indonesia, termasuk melakukan pemberantasan polio dengan mengadakan PIN. Dalam hal ini, kementerian kesehatan memiliki beberapa program pembangunan kesehatan, seperti melakukan penyuluhan kesehatan masyarakat, meningkatkan pelayanan kesehatan, melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit, mengadakan perbaikan gizi dan lain sebagainya. Selanjutnya dalam buku karya David M. Oshinsky yang berjudul *Polio: An American Story* (2005), menjelaskan mengenai wabah polio yang melanda di Amerika mulai dari sejarah polio yang menjadi wabah pertama di negara paman sam tersebut, bagaimana proses menemukan vaksin, hingga upaya penanggulangannya, namun perspektif yang digunakan disini adalah penyakit polio yang terjadi di Amerika.

Untuk jurnal ilmiah yang ditemukan oleh penulis ialah jurnal karya Yunita Astuti, yaitu *Kerja Sama WHO – RI dalam Menangani Virus Polio di Indonesia Melalui Program Bebas Polio*. Dalam jurnal ini Astuti menjelaskan dari segi hubungan sosial dan politik yang terjadi antara WHO dan RI dalam menangani polio di Indonesia. Di tulisan ini, Astuti menggunakan perspektif pluralis dengan menggunakan kajian literatur. Dalam jurnal ini, Astuti menggambarkan bagaimana WHO dan pemerintah Indonesia melalui program bebas penyakit untuk mengeradikasi polio. Dimana kesehatan merupakan

salah satu isu hubungan internasional yang menarik perhatian dunia, dan masalah kesehatan yang dianggap sangat penting adalah mengenai polio. Selain perbedaan perspektif yang digunakan, dalam inti pembahasan antara jurnal ilmiah karya Astuti dan saya selaku penulis juga memiliki perbedaan, yaitu dimana pada jurnal ilmiah ini lebih menekankan mengenai bagaimana Kerjasama WHO dan RI dalam Menangani virus polio.

Selain itu, menurut pandangan saya, dalam membahas sejarah tidaklah harus semata-mata membahas terkait topik-topik seperti politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Sejarah dalam bidang kesehatan juga sangat penting untuk kita telaah dan ketahui. Sebab kesehatan merupakan suatu hal yang mendasar dalam hidup manusia. Maka inilah yang menjadi salah satu alasan penulis untuk meneliti topik tersebut. Hal menarik dari penelitian ini ialah, meskipun angka pengidap polio terus menunjukkan penurunan, polio tetap ada dan berpotensi menimbulkan wabah atau kejadian luar biasa.

B. Rumusan dan Pembatasan Masalah

A. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi oleh aspek temporal dan spasial. Untuk aspek spasialnya penelitian ini akan berfokus pada epidemi penyakit polio di Indonesia. Pertama, karena Indonesia merupakan salah satu negara terjangkit penyakit polio yang memiliki angka kelahiran terbanyak. Selain itu, penulis juga mengangkat mengenai kebijakan dan program yang dilakukan bersifat nasional dan menyeluruh. Dimana hal ini menjadi suatu cakupan yang luas. Serta pada hakikatnya kebijakan pemerintah merupakan kebijakan untuk

publik dalam pengertian seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum).

Sedangkan untuk aspek temporalnya penulis memulai penelitian ini dari tahun 1993 hingga 1998. Alasan penulis menentukan aspek temporal tersebut, karena pada tahun inilah Menteri Kesehatan Indonesia dalam Kabinet Pembangunan VI memulai untuk menyelenggarakan dan memfokuskan terhadap gerakan eradikasi polio hingga memiliki pencapaian khusus dalam bidang kesehatan menanggapi epidemi polio dimana Indonesia memperoleh nol kasus terhadap pengidap polio. Pada saat itu, Dr. Sujudi selaku menteri yang menjabat saat itu memperkenalkan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dengan target Indonesia bebas polio, MOP, dan Surveilans AFP. Hal lainnya ialah, penulis mengambil batasan akhir dari penelitian di tahun 1998 karena pada tahun tersebut juga terjadi penurunan, bahkan tidak ditemukan kasus korban terjangkit polio setelah tahun 1998.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan kebijakan pemberantasan polio di era Kementerian Kesehatan dalam Kabinet Pembangunan VI (1993-1998)?

2. Bagaimana dampak pemberantasan polio di era Kementerian Kesehatan dalam Kabinet Pembangunan VI (1993-1998)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai

kebijakan yang dilakukan Kementerian Kesehatan dibawah kepemimpinan Dr. Sujudi dalam Kabinet Pembangunan VI dalam upaya menangani peristiwa epidemi polio di Indonesia di tahun 1993 hingga 1998. Mulai dari faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan penyakit tersebut, hingga berujung terhadap upaya penanganan yang dilakukan oleh kementerian kesehatan. Serta bagaimana respon dan kondisi masyarakat terhadap dampak dari kebijakan akan pemberantasan polio.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah kesehatan khususnya bagi sejarah pada masa orde baru.

b. Kegunaan Praktis

Belajar dari kasus polio yang terjadi pada masa orde baru, secara praktis pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan mengenai bagaimana melakukan imunisasi terhadap penyakit-

penyakit yang berkembang di dalam masyarakat. Selain itu diharapkan tulisan ini akan menjadi sarana kesadaran bagi

masyarakat dan pemerintah untuk lebih sadar akan pentingnya kesehatan serta pemberantasan penyakit menular secara cepat

dan tepat.

D. Metode dan Bahan Sumber

Penelitian ini membahas tentang bagaimana Kementerian Kesehatan dalam Kabinet Pembangunan VI menangani epidemi polio di Indonesia pada tahun 1993-1998. Dimana pada saat itu diperkenalkan Pekan Imunisasi Nasional sebagai kampanye kesehatan masyarakat terbesar di abad ke-20 untuk membasmi penyakit polio, dilakukannya mopping up hingga surveilans AFP. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode historis dengan pendekatan deskriptif-naratif. Penelitian ini dilaksanakan dengan prosedur dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian sejarah. Untuk mencapai tujuan penelitian dalam merekonstruksi sebuah peristiwa secara kritis menjadi satu kesatuan, maka penulisan sejarah harus melalui lima tahap dalam penelitian sejarah meliputi pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik dan keabsahan sumber), interpretasi, dan penulisan atau historiografi (Kuntowijoyo, 2013, p. 69).

a. Pemilihan Topik

Pemilihan topik merupakan suatu proses dalam pemilihan tema yang akandiangkat dan dibahas dalam penelitian. Dalam pemilihan topik, penulis dianjurkan untuk memiliki dua kedekatan dalam dasar pemilihannya. Yaitu kedekatan emosional dan kedekatan intelektual.

Disini, peneliti tertarik untuk mengangkat topik ini karena memiliki kesukaan terhadap anak-anak. Selanjutnya, peneliti melihat bagaimana keragaman dari penyakit yang terjadi pada anak-anak, yang mengacu kepada polio. Setelah itu mencari informasi mengenai bagaimana upaya

yang dilakukan Kementerian Kesehatan dalam Kabinet Pembangunan VI (1993-1998). Dimana pada masalah yang diangkat ini, terjadi beragam upaya terhadap proses pemberantasan polio pada tahun-tahun tersebut. Sujudi yang menjabat sebagai menteri kesehatan pada saat itu juga memperkenalkan program kampanye kesehatan masyarakat terbesar di abad ke-20 untuk membasmi penyakit polio.

b. Pengumpulan Sumber

Setelah menentukan topik yang akan diteliti, tahap selanjutnya ialah proses pengumpulan sumber yang memuat informasi berkaitan dengan topik penelitian. Sumber primer yang banyak diperoleh dan menjadi acuan utama penulis ialah surat kabar sezaman (Kompas, Berita Yuda, Angkatan Bersenjata, Soera Pembaharuan, dan Republika) yang diperoleh melalui Perpustakaan Nasional Salemba, wawancara dengan Direktur Program FETP Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1951, surat peresmian dimulainya PIN pada 1995 oleh Presiden Soeharto, sambutan Presiden mengenai produksi dan pengawasan mutu vaksin polio pada tahun 1992, sambutan Presiden pada tahun 1978, serta kumpulan pidato, sambutan dan pengarahan Menteri Kesehatan RI tahun 1994, 1995, dan 1996 yang diperoleh melalui Perpustakaan Kementerian Kesehatan dan Layanan Arsip Nasional Indonesia. Sedangkan untuk sumber sekunder peneliti peroleh dari berbagai literatur (berupa jurnal, buku, skripsi, laporan penelitian dan website di internet yang kredibel untuk dijadikan sebagai acuan sumber penelitian).

c. Kritik Sumber

Setelah sumber terkumpul, langkah selanjutnya ialah tahap verifikasi atau kritik sumber. Kritik sumber ialah sebuah proses pengujian sumber-sumber yang telah didapatkan untuk dibandingkan dengan sumber lain guna mendapatkan sumber yang orisinal serta kredibel (Pranoto, 2010). Dalam penelitian ini, karena peneliti menggunakan media seperti surat kabar dan wawancara langsung sebagai sumber primer, maka hal ini memudahkan peneliti dalam menguji kevalidan data. Untuk kritik ekstern penulis membandingkan sumber yang terdapat di beberapa sumber lainnya pada kurun waktu yang telah ditetapkan. Wawancara, koran sezaman, serta artikel yang memuat informasi mengenai penyakit poliomyelitis di dunia dan di Indonesia dapat membuktikan kredibilitas sumber. Contohnya kritik ekstern yang dilakukan ialah peneliti mencari beberapa koran sezaman, yaitu Republika, Suara Pembaharuan, dan Angkatan Bersenjata pada tanggal 12 September 1995 dimana mewartakan mengenai kesiapan PIN gelombang satu secara serentak. Maka untuk mengecek kebenarannya terkait kesiapan pelaksanaan PIN pada tahun 1995, penulis menyandingkan beberapa surat kabar. Tujuannya ialah untuk menguji silang mengenai kebenaran sumber satu sama lain.

d. Interpretasi

Tahap selanjutnya ialah interpretasi, dimana merupakan tahap untuk menyimpulkan fakta-fakta sejarah dan mencari hubungan antar fakta sehingga perubahan peristiwa sejarahnya dapat terlihat dengan jelas

dan runtut, serta kaitan antara peristiwa satu dengan peristiwa lainnya mudah dipahami. Dengan proses wawancara yang dilakukan terhadap saksi sejarah mengenai polio di Indonesia, serta pengumpulan sumber-sumber lain yang kredibel, penulis berusaha untuk mendapatkan fakta-fakta yang disusun sesuai dengan urutan dan kejadian.

e. Penulisan

Pada tahap akhir ini peneliti menyimpulkan fakta-fakta sejarah dan mencari hubungan antar fakta sehingga perubahan peristiwa sejarahnya dapat terlihat dengan jelas dan runtut, serta kaitan antara peristiwa satu dengan peristiwa lainnya mudah dipahami. Disini peneliti memanfaatkan berbagai sumber yang ada, baik sumber primer maupun sekunder yang telah diperoleh.

*Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa*